

**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN METESEH
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG
(Studi Kasus di Sanggar Batik Semarang 16)**

Nur Fitria Arini, Dra. Dewi Rostyaningsih, M.Si
**Departemen Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan yang tidak dapat terlepas dari kehidupan. Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 4 tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang. Salah satu program penanggulangan kemiskinan tersebut adalah program bantuan peningkatan keterampilan dengan mengadakan beberapa pelatihan. Kelurahan Meteseh merupakan salah satu kelurahan sasaran program pelatihan keterampilan dengan jumlah warga miskin yang mengalami penurunan. Pelatihan yang sampai saat ini masih dilakukan masyarakat kelurahan Meteseh dan yang paling menonjol adalah pelatihan membatik di Sanggar Batik Semarang 16. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan membatik ini mengacu pada konsep pemberdayaan Alfitri dengan indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yaitu efektivitas dan efisiensi serta mengkaji faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program. Konsep pemberdayaan yang digunakan adalah meliputi beberapa indikator yaitu penguasaan faktor produksi, penguatan sumber daya manusia, spesifik lokasi dan permasalahan, serta pemakaian sumber daya secara sadar dan terencana. Faktor pendorong yang mempengaruhi program ini yaitu sosialisasi yang sering dilakukan oleh masyarakat kelurahan dan adanya partisipasi masyarakat yang sadar akan tingkat kesejahteraan hidupnya. Sedangkan faktor penghambat yang terlihat dalam program ini yaitu kurangnya kesadaran pemakaian alat produksi batik yang baik dan benar, kurangnya pendamping untuk mengarahkan para penerima program dalam memproduksi, serta akses lokasi berupa transportasi dan jalan menuju sanggar batik yang kurang diperhatikan.

Kata Kunci : *Kemiskinan, Evaluasi, Pemberdayaan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yaitu makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Adanya keadaan ketidakmampuan tersebut pada akhirnya kerap kali menimbulkan masalah, seperti penyakit dan kebodohan, yang kemudian mengantarkan pada kondisi - kondisi yang lebih buruk lainnya, yaitu pengangguran maupun kriminalitas. Sebagaimana program- program penanggulangan kemiskinan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang. Peraturan Daerah tersebut menjadi payung bagi SKPD dan kecamatan yang ada di Kota Semarang dalam menjalankan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Hasil pendataan tahun 2016 menunjukkan bahwa 20,82 % penduduk Kota Semarang tergolong miskin. Terdapat

penurunan jumlah warga miskin di Kota Semarang sebanyak 4,95 % dalam kurun waktu 2012 hingga 2014 dan 0,67 % dalam kurun waktu 2014 hingga 2016. Angka penduduk miskin yang masih tinggi menuntut seluruh Pemerintah Daerah Kota Semarang melakukan langkah - langkah konkrit dan mendasar untuk menekan angka tersebut. Dengan kata lain, diperlukan kebijakan yang spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program atau kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin.

Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu menyempurnakan program perlindungan sosial, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan yang inklusif. Penurunan angka kemiskinan tersebut tidak lepas dari kebijakan maupun strategi berbasis pemberdayaan

yang terus dilakukan kepada masyarakat. seperti program pelatihan keterampilan dengan melihat tingkat ekonomi masyarakat. Program pelatihan keterampilan juga termasuk ke dalam program penanggulangan kemiskinan Kota Semarang melalui bantuan peningkatan keterampilan.

Dari data statistik penduduk miskin menurut Bappeda Kota Semarang, Kecamatan Tembalang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Semarang. Jumlah penduduk miskin di Kecamatan Tembalang pada tahun 2016 mencapai 35.543 jiwa. Salah satu kelurahan di Kecamatan Tembalang yaitu Kelurahan Meteseh memiliki rekapitulasi penduduk miskin pada tahun 2014 sejumlah 3.474 jiwa dibandingkan pada tahun 2016 mengalami penurunan dengan jumlah 3.436 jiwa. Persentase penurunan warga miskin dalam kurun waktu 2 tahun tersebut sebesar 2,92 %. Kelurahan Meteseh telah melaksanakan program pelatihan sejak tahun 2013 hingga

sekarang masi berjalan dan setiap tahunnya pun berbeda jenis programnya.

Pada tahun 2015 - 2016 Kelurahan Meteseh telah melaksanakan program pelatihan keterampilan pada masyarakat miskin di kelurahan tersebut. Program tersebut dilaksanakan berdasarkan potensi yang ada dalam masyarakat serta wilayah. Selain itu pelatihan keterampilan di Kelurahan Meteseh yang paling terlihat menonjol dari jenis pelatihan lainnya yang telah mendapat sertifikat berupa pelatihan terbaik kelurahan di Kota Semarang adalah pelatihan batik. Sanggar batik Semarang 16 tersebut sudah banyak menyerap tenaga kerja dari penduduk sekitar sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan warga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil dari evaluasi pemberdayaan penanggulangan kemiskinan melalui program pelatihan keterampilan di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang?
2. Apa sajakah faktor pendorong dan faktor penghambat program pelatihan keterampilan di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang?

C. Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro

(2012: 21) mendefinisikan Administrasi publik adalah 1) Kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan, 2) Meliputi tiga cabang pemerintahan : legislatif, eksekutif, dan hubungan diantara mereka, 3) Mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik, 4) Sangat erat berkaitan dengan berbagai kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan pada masyarakat, 5) Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian administrasi perseorangan.

Sedangkan Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam (Syafie 2006:13), Administrasi adalah suatu fenomenal sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi daripada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat di dalam suatu organisasi.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan kelompok

orang dalam lingkup pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang menyangkut pelayanan kepada orang banyak dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu administrasi publik telah tumbuh menjadi sistem penyelenggaraan kebijakan publik dan semakin penting peranannya dalam proses kebijakan publik.

2. Kebijakan Publik

Anderson dalam Winarno (2012:18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Dalam hal ini, maka, kebijakan publik pun diharapkan dapat memberikan dampak terhadap persoalan - persoalan dan kebutuhan - kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Setelah mendapatkan keputusan program kebijakan apa yang akan diambil , maka program kebijakan tersebut pun diimplementasikan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah yang berwenang pada tahap implementasi kebijakan.

Pada akhirnya, kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai dalam tahap evaluasi kebijakan. Pada tahap evaluasi

kebijakan, suatu kebijakan akan dinilai sejauh mana kebijakan tersebut dapat memecahkan masalah yang ada di masyarakat dan apakah kebijakan tersebut mencapai dampak yang diinginkan.

3. Evaluasi Kebijakan Publik

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat menyimpang dari hasil yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (Subarsono, 2012:126) mencakup lima indikator sebagai berikut : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Adanya evaluasi kebijakan publik mampu mengangkat pencapaian hasil dari penelitian dimana lebih memperdalam lagi tentang pemberdayaan yang dikaji.

Hal ini dapat dilihat bahwa evaluasi kebijakan publik tidak bisa dilepaskan dari pemahaman

mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri.

4. Pemberdayaan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi program pemberdayaan yaitu : (Alfitri: 2011)

- a. Penguasaan faktor produksi
- b. Penguatan SDM
- c. Spesifik lokasi dan permasalahan
- d. Pemakaian sumberdaya secara sadar dan terencana

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, karena penelitian ini berhubungan dengan data-data yang hampir tidak berangka, lebih kearah kata-kata tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan kejadian nyata di lapangan yang sedang peneliti evaluasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Evaluasi Pemberdayaan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang

1.Penguasaan Faktor Produksi

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pelaksanaan program pelatihan keterampilan di Sanggar Batik Semarang 16 dapat dikatakan berhasil karena diterima cukup baik oleh masyarakatnya. Dimulai dari penguasaan bahan baku produksi, pengorganisasian, perencanaan produksi hingga pemasaran hasil batik tersebut.

2.Penguatan SDM

Hasil temuan di lapangan menunjukkan dalam penguatan sumber daya manusia tentu banyak hal yang harus dilakukan. Mulai dari apa yang mendorong penerima program untuk bergabung dalam pelatihan batik ini, perubahan apa yang di rasakan oleh penerima program setelah bergabung dalam pelatihan batik ini, lalu apakah pelaksanaan program pelatihan batik sangat bermanfaat dalam peningkatan pendapatan ekonomi keluarga, kemudian fasilitas yang diterima, harapan serta hambatan yang muncul saat produksi, kegiatan lain untuk merekatkan hubungan antar anggota pelatihan batik, penerapan teknologi baru

dalam produksi batik selama ini dan apakah dikuasai oleh penerima program, keahlian yang dituangkan dalam pelatihan batik ini dan darimana munculnya keahlian tersebut, serta adanya promosi maupun informasi lain guna meningkatkan produktivitas batik.

Banyak perubahan yang dirasakan di Sanggar Batik Semarang 16 ini terlihat dari hasil wawancara yang memang penguatan sumber daya manusia semakin maju melihat kondisi yang dirasakan sekarang beda dengan tahun - tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena setiap individu mempunyai cara tersendiri untuk meningkatkan produksi batik atau dengan kata lain mempunyai karakter masing - masing dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

3.Spesifik Lokasi dan Permasalahan

Melihat hasil temuan di lapangan memang tidak ada masalah dalam hal lokasi maupun permasalahan yang muncul. Dilihat dari keterjangkauan lokasi pelatihan batik dengan anggota penerima program, lalu transportasi apa yang dipakai untuk menuju ke pelatihan batik ada hambatannya atau tidak, serta melihat lokasi pelatihan batik sesuai atau tidak dengan kondisi lingkungan sekitar. Sanggar Batik Semarang 16 dengan

keterjangkauan masyarakat pengrajin batik sejauh ini tidak ada masalah atau hambatan. Semua akses bisa dilalui oleh transportasi apapun seperti mobil, motor karena jalan menuju sanggar dapat dikatakan luas dan tidak membingungkan pengendara.

Secara keseluruhan pula lokasi sesuai dengan kondisi sekitar karena hampir banyak masyarakat sekitar lokasi terhitung mencakup di beberapa RW mulai dari RW 01 – RW 06 bekerja sebagai pengrajin batik di Sanggar Batik Semarang 16 dan misalkan tidak ada sanggar tersebut maka masyarakat mungkin belum tertolong dengan adanya kondisi perekonomian yang kurang mengingat lapangan kerja jauh dari tempat tinggal masyarakat.

4. Pemakaian Sumber Daya Secara Sadar dan Terencana

Pembuatan batik di Sanggar Batik Semarang 16 meskipun menggunakan bahan-bahan sintesis untuk pembuatan batik cap tetapi tetap tidak mengganggu lingkungan sekitar karena proses pembuangan airnya sudah dibuat agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

Selain menggunakan bahan-bahan sintesis, juga menggunakan bahan-bahan yang alami sehingga tetap ramah lingkungan dan tidak mengganggu warga sekitar. Proses batik membuat ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari warga sekitar.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat

1. Faktor Pendorong

Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan di Kelurahan Meteseh mulai dari kegiatan rutin warga pada tingkat RT dan RW, selain itu memanfaatkan wadah yang sudah ada seperti PKK dalam melakukan sosialisasi program pelatihan batik ini. Melalui sosialisasi ini masyarakat menjadi mudah untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan pelatihan batik.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat di kelurahan ini cukup tinggi. Dapat dilihat dari masyarakat mau berkumpul untuk mensosialisasikan program pelatihan ini yang kemudian mereka mengadakan perkumpulan untuk menggali potensi apa saja yang dapat dikembangkan. Hasil dari perkumpulan tersebut dipertimbangkan dan dimasukkan ke musrenbang desa terkait pelatihan batik bagaimana yang

mereka inginkan. Hasil musrenbang inilah yang menjadikan SKPD - SKPD memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan - kebutuhan apa yang diperlukan.

2. Faktor Penghambat

Peran Pendamping Masih Lemah

Pendamping yang dimaksud disini adalah perguruan tinggi seperti PTN/PTS dan CSR seperti bank atau perbankan. Berbasis pada penanggulangan yang ditekankan untuk memberdayakan masyarakat miskin jadi melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Pihak perguruan tinggi yang dianggap lebih kompeten dalam seperti pemasaran dirasakan juga masih kurang maksimal. Pihak dari kampus lebih kepada teori, padahal masyarakat lebih membutuhkan aksi untuk memasarkan produk ini.

Kondisi dan Pemakaian Sarana dan Prasarana Produksi Batik yang Kurang Optimal

Di Sanggar Batik Semarang 16, kondisi dan pemakaian alat dan bahannya memang kurang mendapat perhatian khusus. Kondisi beberapa alat yang bisa dikatakan sudah dari lama dan

belum ada pergantian dengan alat yang baru memang mempengaruhi baik buruknya produksi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua pembahasan konsep pemberdayaan di atas, dapat dikaitkan dengan dua indikator evaluasi yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas disebut juga hasil guna yang selalu terkait dengan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Sedangkan efisiensi adalah seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan serta optimalisasi penggunaan sumber daya. Jika pada pelaksanaan kebijakan publik belum dapat atau mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan suatu kebijakan tersebut gagal.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan pelaksanaan program pelatihan pembuatan batik di Sanggar Batik Semarang 16 dapat dikatakan berhasil karena diterima cukup baik oleh masyarakatnya. Peran aktif dari masyarakat dengan adanya program ini memberikan kesempatan yang seluas - luasnya dalam penanggulangan

kemiskinan mengingat program pemerintah ini mempunyai manfaat yang besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat miskin.

B. Saran

1. Peningkatan akan kesadaran pemakaian produksi batik supaya alat dan bahan tetap terjaga dengan baik agar sebagai penerima program juga akan menikmati hasilnya yang berbeda dengan kondisi sebelumnya.
2. Persediaan tambahan pelatih dengan jumlah yang memadai untuk masing-masing bagian produksi batik karena dalam pelatihan program lebih banyak praktek yang membutuhkan beberapa pelatih untuk mendampingi dan mengarahkan para penerima program agar lebih terarah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Alfitri. 2011. *Community Development Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

AG, Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bagong, Suyanto. 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang : Intrans Publishing.

Effendi, Sofian dan Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survey: contoh kasus Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Keban, Yeremias T. 2008. *Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gaya Media.

Mardikanto, Totok, Poerwoko Soebiato. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roasdakaraya.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan., 1999. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta: IMPAC.
- , 2007. *Pemberdayaan Sosial, Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Bandung : Erlangga.
- Usman, Sunyoto.2005. *Pembangun dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps.
- Artikel Jurnal/Skripsi**
- Renggapratiwi, Amelia. (2009). Kemiskinan dalam Perkembangan Kota Semarang: Karakteristik dan Respon Kebijakan. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Kristianto, Lilik. (2010). Sinergi Kebijakan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surakarta. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Fachrudin, Reza. (2014). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan. *Skripsi*. Universitas Brawijaya.
- Iswari, Voni Hardila. (2016). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Semaarang. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

Internet

<http://batiksemarang16.com/>
<https://bappeda.semarangkota.go.id>
<https://semarangkota.go.id/>
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170717132808-92-228339/penduduk-miskin-di-indonesia-capai-2777-juta-orang> (diakses 14 November 2016)
<https://www.kemsos.go.id/siaranpers/penduduk-miskin-turun-11-9-juta-bps-akui-pkh-dan-rast-ra-berdampak-signifikan>(diakses pada 23 Mei 2017)
<https://media.neliti.com/media/publications/719-ID-dinamika-kemiskinan-rumah-tangga.pdf> ((diakses pada 26 Maret 2017)
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2016/07/18/1229/persentase-penduduk-miskin-tahun-2016-mencapai-10-86-persen.html>(diakses pada 18 Februari 2017)
<http://beritadaerah.co.id/2014/11/24/program-penanggulangan-kemiskinan/>(diakses pada 26 Maret 2017)

Dokumen-dokumen

Peraturan Daerah Kota Semarang No.4 Tahun 2008 pasal 14 tentang program penanggulangan kemiskinan
Peraturan Daerah Kota Semarang No.4 Tahun 2008 pasal 19 tentang bantuan peningkatan keterampilan
Peraturan Presiden no.15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan
Laporan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2015 - 2016 di Kelurahan Meteseh
Data Kelurahan Meteseh tahun 2017
Laporan Bulanan Monografi Kelurahan Meteseh 2017